

POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI BAWAH PRESIDEN JOKOWI DALAM KASUS KRISIS POLITIK DI MYANMAR TAHUN 2021

Agung Jaya Bakti, Anna Yulia Hartati

*Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik,
Universitas Wahid Hasyim Semarang*

email : abangjay76@gmail.com

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor pendorong Indonesia membantu penyelesaian Krisis Politik di Myanmar. Indonesia sebagai salah satu negara tetangga Myanmar bersikap terhadap krisis politik yang terjadi Myanmar dengan membantu proses penyelesaian krisis tersebut. Pengambilan keputusan untuk membantu krisis politik Myanmar tersebut di inisiasi oleh presiden Indonesia Jokowi yang didorong oleh berbagai faktor dalam pengambilan keputusan tersebut. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik studi pustaka, dengan pendekatan Decision Making Theory Richard C. Snyder, penelitian ini menemukan ada 2 (dua) faktor pendorong Indonesia dalam membantu penyelesaian krisis politik di Myanmar yaitu faktor internal yang berupa non-human environment dan human environment, serta faktor eksternal yang berupa non-human environment dan other society.

Kata Kunci: *Politik Luar Negeri Indonesia, Krisis Politik, Myanmar.*

A. Pendahuluan

Myanmar yang memperoleh kemerdekaannya dari Britania Raya (Inggris) pada 4 Januari 1984 adalah sebuah negara yang berlokasi paling ujung barat di wilayah Asia Tenggara. Jika kita melihat gambar pada peta Myanmar terlihat bahwa Myanmar merupakan suatu negara dengan letak geografisnya yang amat strategis. Letaknya berbatasan langsung dengan 5 negara tetangga, yakni dengan Cina di sebelah utara; dengan Laos disebelah timur; Thailand sebalah tenggara; Bangladesh sebelah barat; dan dengan India disebelah barat laut. Meski Myanmar dikelilingi oleh 5 negara yang berbatasan langsung dengan dirinya, Myanmar bukanlah negara yang ‘terkunci’ (*landlocked state*). Sebelah selatan Myanmar berhadapan dengan Laut Andaman, dan sebelah barat dayanya menghadap ke Teluk Bengal. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan 5 negara ini tentu Myanmar harus membina hubungan baik dengan mereka. Hubungan baik bisa terbina apabila kondisi politik ekonomi didalam negeri Myanmar relatif baik dan terbuka. Artinya, apabila Myanmar tidak dihadapkan dengan masalah kehidupan politik dalam negeri seperti sekarang

ini - seperti tekanan-tekanan Junta Militer kepada kelompok-kelompok etnis Myanmar maupun konflik antaretnis-tentu hubungan ekonomi dan politik dengan negeri-negara tetangga akan bisa berjalan dengan lebih terbuka dan maju. Kenyataannya, perhatian Myanmar lebih banyak terpusat ke masalah dalam negeri ketimbang peran aktifnya di luar Myanmar, khususnya di ASEAN.

Myanmar sebenarnya merupakan negara yang terkenal tertutup terhadap dunia Internasional, hal tersebut dikarenakan sejak tahun 1962, Myanmar, atau pada saat itu dikenal dengan Burma, telah dikuasai oleh pemerintah Junta Militer setelah kudeta yang dilakukan Jenderal Ne Win. Sejak saat itu kepemimpinan Myanmar dikuasai oleh rezim militer yang menjalankan system pemerintahan secara represif. Pada tanggal 17 November 1997, Myanmar sebagai negara dengan pemerintahan junta militer, kerap kali menjadi pusat perhatian dunia dan masyarakat Internasional atas berbagai isu global dan pelanggaran, seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), perdagangan narkoba, kerja paksa, dan pelanggaran demokrasi.

Membicarakan tentang demokrasi, secara umum istilah demokrasi pertama kali muncul tahun 508-507 sebelum Masehi yang dikenalkan oleh filsuf Yunani, Cleisthenes. Cleisthenes kemudian dikenal sebagai “bapak demokrasi Athena”. Melalui Cleisthenes istilah “demos” yang artinya rakyat dan “kratos” yang artinya kekuatan, menyebar keseluruh penjuru dunia. Dalam perkembangannya, istilah demokrasi kemudian lekat dengan dua konsep penting yaitu kebebasan dan demokrasi. Dua istilah tersebut selalu muncul dalam diskursus seputar demokrasi diberbagai pembahasan.

Di Indonesia, konsep demokrasi yang paling terkenal adalah definisi demokrasi menurut Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah “dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat” disampaikan dalam sebuah pidatonya atau dikenal sebagai “*Gettysburg Address*.” Bisa dikatakan semua orang tahu definisi tersebut dan semakin memudahkan setiap orang untuk memahami arti demokrasi secara mudah.

Pada tahun 1942, teori demokrasi klasik didefinisikan oleh Joseph Schumpeter dengan istilah “kehendak rakyat” sebagai sumbernya dan “kebaikan bersama” sebagai tujuannya. Pada tahun 1942, teori demokrasi klasik didefinisikan oleh Joseph Schumpeter dengan istilah “kehendak rakyat” sebagai sumbernya dan “kebaikan bersama” sebagai tujuannya. Kemudian, definisi tersebut berubah menjadi “metode demokratis” yakni prosedur kelembagaan untuk mencapai keputusan politik yang di dalamnya terdapat individu yang memperoleh kekuasaan untuk membuat suatu keputusan atau kebijakan secara kompetitif

dalam rangka memperoleh suara dari rakyat. Demokrasi saat ini merupakan bentuk pemerintahan yang paling banyak dianut di seluruh dunia. Demokrasi sendiri bukanlah bentuk baru pemerintahan yang ada di dunia, namun penganutnya tetap banyak. Hadirnya demokrasi telah menjadi hal yang sangat berarti dan nyata untuk mengatasi masalah sosial politik di berbagai negara. Terdapat tiga hal utama dalam substansi demokrasi politik yakni kompetisi, partisipasi, dan kebebasan politik dan sipil. Kompetisi sendiri terjadi secara luas antara individu dan kelompok organisasi serta seluruh kekuasaan pemerintah, dalam jangka waktu teratur dan tidak menggunakan kekerasan. Partisipasi yang menyeluruh merupakan salah satu faktor menyukseskan suatu kepemimpinan dan dalam pengambilan kebijakan. Sementara kebebasan politik dan sipil, yakni kebebasan dalam berpendapat, pers yang bebas, dan berserikat serta berkumpul yang bertujuan untuk menjamin integritas partisipasi dan kompetisi dalam berpolitik. Ketiga substansi dasar dalam demokrasi tersebut harus diperjuangkan untuk mencapai proses demokratisasi.

Kudeta pada tahun 1961 merupakan bagian dari sejarah penting bangsa Myanmar dalam memperjuangkan demokrasi. Berbeda dengan kudeta sebelumnya, alasan utama kudeta militer yang terjadi pada 1 Februari yang lalu adalah tuduhan kecurangan yang terjadi pada Pemilu yang diselenggarakan November 2020. Hal ini menyebabkan kemarahan dari masyarakat sipil Myanmar dan menuntut agar pihak militer segera mengembalikan kekuasaan kepada pemerintah yang terpilih. Kudeta ini menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat akan kembalinya kekuasaan pemerintah otoriter dan hilangnya demokrasi. Kekhawatiran ini bukannya tanpa dasar, sebab pihak militer nampak enggan mengembalikan kekuasaan kepada pemerintahan terpilih, terus melakukan penangkapan para tokoh politik nasional, serta bersikap agresif terhadap pergerakan anti-kudeta yang dilakukan oleh masyarakat sipil.

Dalam waktu yang singkat, pihak militer kembali mengambil alih pemerintahan Myanmar. Kudeta yang dimulai pada 1 Februari 2021 yang lalu merupakan awal dari kembalinya militer pada tampuk kekuasaan Myanmar. Kudeta ini diawali oleh penahanan Suu Kyi bersama Presiden Win Myint dan para pemimpin lainnya oleh kelompok militer. Penahanan yang berujung kudeta itu dilakukan setelah sehari-hari ketegangan meningkat antara pemerintah sipil dan junta militer Partai Liga Nasional Untuk Demokrasi (NLD) besutan Aung San Suu Kyi meraih kemenangan gemilang dalam pemilu 8 November lalu. Pemilihan ini dianggap dianggap sebagai bebas dan adil oleh pengamat internasional sejak berakhirnya kekuasaan militer langsung pada tahun 2011. Namun kelompok militer menilai

terjadi kecurangan pemilih yang meluas meski sudah dibantah oleh komisi pemilihan. Hal ini telah menyebabkan konfrontasi langsung antara pemerintah sipil dan militer. Pemimpin tertinggi Tatmadaw Jenderal Senior Min Aung Hlaing bersikeras bahwa kudeta militer adalah langkah yang dibenarkan. Ia masih berdalih pemilu yang dilakukan November itu curang sehingga harus diadakan kembali, menetapkan status darurat nasional selama setahun ke depan. Sementara itu, semakin banyak warga yang tewas membuat marah dunia internasional. Uni Eropa (UE) mengatakan akan memberikan sanksi terhadap para jenderal-jenderal pelaku kudeta itu. Tidak hanya Uni Eropa, Pemerintah Indonesia melalui Presiden Jokowi, mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan, agar tak ada lagi korban yang berjatuh. Menurut beliau, keselamatan dan kesejahteraan rakyat harus diprioritaskan.

Pada tanggal 24 April 2021 dalam ASEAN Leader's Meeting, Sejumlah pemimpin negara-negara ASEAN hadir atas undangan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah, selaku Ketua ASEAN. Untuk diketahui, ALM ini merupakan inisiatif Indonesia dan merupakan tindak lanjut dari pembicaraan Presiden Joko Widodo dengan Sultan Brunei Darussalam selaku Ketua ASEAN terkait penyelesaian situasi Myanmar. Penyelenggaraan ALM diharapkan dapat mencapai kesepakatan, utamanya mengenai langkah-langkah yang baik bagi rakyat Myanmar dan membantu Myanmar keluar dari situasi Krisis Politik saat ini. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno Marsudi, dalam keterangannya pada Jumat, 23 April 2021, kemarin menyatakan bahwa penyelenggaraan pertemuan tersebut menjadi pertemuan langsung secara fisik pertama para pemimpin ASEAN selama masa pandemi ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal itu menggambarkan keseriusan dan tekad kuat para pemimpin ASEAN untuk membantu Myanmar.

Artikel ini akan menjelaskan factor pendorong Indonesia membantu proses penyelesaian krisis politik di Myanmar pada era Presiden Jokowi, dengan dibantu oleh pendekatan *Decision Making* dalam disiplin ilmu hubungan internasional yang berfungsi untuk menjelaskan bagaimana serangkaian proses pengambilan keputusan luar negeri dirumuskan oleh aktor-aktor internasional beserta hal-hal yang mempengaruhinya. Menurut Snyder sendiri kebijakan luar negeri suatu negara merupakan hasil dari dua konsiderasi atau faktor yang menjadi penyebab diambilnya kebijakan luar negeri oleh para pembuat keputusan. Kedua konsiderasi tersebut yaitu; Pertama, struktur dan ruang lingkup pada sistem domestik (*Internal Setting*) dan sistem internasional (*External Setting*).

B. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, yang mana pendekatan ini mampu memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang kompleks, yang mana memerlukan penelitian yang lebih bersifat deskriptif dan menekankan kepada kedalaman suatu informasi. Penulis melakukan pemahaman mengenai kebijakan Indonesia terhadap Myanmar dengan objek kajian dari penelitian ini adalah tentang Kebijakan Presiden Joko Widodo Terhadap Krisis Politik Di Myanmar. Di dalam kerangka penelitian kualitatif ini penulis mempunyai maksud ingin mengeksplorasi untuk mendapatkan pemahaman mengenai faktor yang mendorong Indonesia membantu penyelesaian krisis politik di Myanmar.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Internal

1.1. *Non-Human Environment (Kondisi Politik/Pemerintahan)*

Selama hampir dua periode kepemimpinan Presiden Jokowi, politik luar negeri Indonesia dijalankan dengan sangat kolaboratif. Tidak saja fokus pada isu-isu ekonomi, Indonesia juga aktif dalam merespon isu HAM. Kudeta Militer yang terjadi di Myanmar, Presiden Indonesia Joko Widodo mendesak pihak Militer Myanmar untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Kedamaian di Myanmar harus di kembalikan, dan kepentingan rakyat Myanmar harus menjadi prioritas utama.

Jika dilihat dari hubungan bilateral, krisis politik yang terjadi juga berpotensi mengganggu stabilitas dan hubungan kerjasama antara Indonesia dengan Myanmar. Hingga kini, hubungan dan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Myanmar masih berlangsung cukup baik. Banyak program yang terus berjalan, baik di bidang pendidikan, ekonomi dan politik. Akan tetapi, jika konflik dan krisis yang terjadi di Myanmar tak kunjung selesai, serta situasi politik keamanan belum juga stabil, maka bisa saja akan mengancam pada stabilitas hubungan dan kerjasama antar keduanya.

Indonesia bersama-sama Negara ASEAN mendorong upaya damai sebagai jalan keluar persoalan yang dihadapi Myanmar. Indonesia dalam hal ini Menteri Luar Negeri, mengambil inisiatif melakukan *Shuttle Diplomacy/Diplomasi Ulang-alik* yaitu upaya yang dilakukan pihak kegiatan untuk menjadi mediator dalam mendamaikan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik yang tidak bersedia berunding secara langsung.

Menteri Luar Negeri RI melakukan kunjungan ke beberapa Negara di ASEAN untuk berkonsultasi tentang penyelesaian Isu Politik di Myanmar. Pada tahap pertama, Indonesia melakukan kunjungan ke Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Serta pada tahap kedua, Indonesia berkunjung ke China dan Jepang. Indonesia mendorong penyelesaian masalah secara inklusif dan dialogis untuk menghindari jatuhnya korban, serta tetap menjaga prinsip-prinsip dalam Piagam Asean. upaya diplomasi tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti amanat Presiden RI Joko Widodo yang bersepakat dengan Perdana Menteri Malaysia tentang perlunya pertemuan khusus para menlu ASEAN guna membahas penyelesaian krisis politik di Myanmar, pasca kudeta militer 1 Februari 2021.

Pada 24 April 2021, Indonesia melakukan upaya diplomasi dengan menggelar pertemuan para pemimpin ASEAN yang menghasilkan 5 poin Konsensus. Meliputi:

1. Kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.
2. Segera dimulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.
3. Utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.
4. ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre.
5. Utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.

Selain penerapannya yang lamban, 5 Konsensus tersebut banyak mendapat kritik salah satunya adalah Justice For Myanmar, mengatakan Konsensus Lima Poin ASEAN tidak hanya sepenuhnya gagal menyelesaikan krisis Myanmar tetapi juga memungkinkan status quo blok itu terlibat dengan junta yang menciptakan krisis. Selain Justice For Myanmar, Amnesty Internasional juga mengungkapkan ketidakpuasan terhadap penerapan Konsensus Lima Poin di Myanmar. Amnesty International mendesak ASEAN untuk menyoroti kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar.

Pada pertemuan ke-54 ASEAN Ministerial Meeting (AMM) 2-5 Agustus 2021, Menteri Luar Negeri RI menegaskan posisi Indonesia dari sejak pertama terjadinya kudeta selalu konsisten. Posisi Indonesia dalam masalah kudeta militer di Myanmar adalah keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar menjadi prioritas, demokrasi harus dikembalikan dan dialog inklusif harus dilakukan untuk mengatasi krisis politik tersebut. Selanjutnya, Menlu Retno mengatakan, bahwa Indonesia dalam pertemuan AMM ke-54 juga

berharap agar Myanmar dapat segera menyetujui usulan ASEAN mengenai penunjukan Special Envoy, serta mendesak ASEAN harus memastikan Special Envoy mendapat jaminan akses penuh baik terkait dengan pertemuan dengan berbagai pihak maupun pergerakan. Hal ini dimaksudkan agar implementasi 5 Point of Consensus lainnya dapat segera dilakukan karena terus terjadinya hambatan.

Jika pertemuan ini gagal memastikan langkah konkrit implementasi 5 Point of Consensus, maka Indonesia mengusulkan bahwa isu mengenai tindak lanjut 5PCs ini dikembalikan ke para Pemimpin ASEAN untuk mendapatkan arahan mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan ASEAN sesuai dengan piagam ASEAN. Indonesia juga menekankan bahwa ASEAN tidak boleh diam membiarkan penderitaan rakyat Myanmar. Mereka saat ini memerlukan bantuan kemanusiaan serta mengusulkan ASEAN segera mengambil langkah pemberian bantuan kemanusiaan termasuk untuk kaum perempuan dan anak-anak.

September 2021, Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan kepada Myanmar untuk menanggulangi COVID-19 sebesar USD 200.000 melalui ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management (AHA Centre). Kontribusi tersebut disampaikan dalam bentuk barang kesehatan produksi Indonesia yakni masker KN95, sarung tangan medis, dan Alat Pelindung Diri (APD). Komitmen tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno L. P. Marsudi dalam Pledging Conference to Support ASEAN's Humanitarian Assistance to Myanmar pada tanggal 18 Agustus 2021. Menlu Retno Marsudi menegaskan kembali posisi Indonesia bahwa bantuan kemanusiaan adalah salah satu komponen penting untuk mengatasi tiga krisis sekaligus yang sedang terjadi di Myanmar, yaitu politik, ekonomi, dan kemanusiaan. Krisis tersebut kini diperparah dengan situasi pandemi COVID-19. Pemberian bantuan kemanusiaan kepada Myanmar ini merupakan tindak lanjut dari kesepakatan Five-Point Consensus pada ASEAN Leader's Meeting yang diselenggarakan pada 24 April 2021 lalu. Bantuan kemanusiaan Fase 1 dengan tema "Live Saving" akan didistribusikan mulai bulan September 2021, dan mencakup bantuan untuk menanggulangi pandemi COVID-19. Fase 2, "Live Sustaining", akan dimulai di tahun 2022 dan akan terdiri dari bantuan kemanusiaan yang lebih beragam.

Di sisi lain, sebagaimana fungsi *foreign policy* dalam konteks bantuan luar negeri, Indonesia sebagai negara donatur dan inisiator bagi masuknya bantuan dana ke Myanmar, adalah bagian dari upaya membangun citra yang baik di hadapan dunia internasional,

khususnya negara Asia Tenggara dan Myanmar. Citra tersebut merupakan modal bagi Indonesia untuk menaikkan levelnya menjadi negara terpancang dan disegani, dengan pertimbangan riwayat pengalaman dan sepak terjangnya dalam memediasi konflik, juga dalam mempromosikan perdamaian internasional.

Kepentingan tersebut juga sering disampaikan oleh Presiden Jokowi di hadapan media dan pers, bahwa arah politik luar negeri Indonesia adalah untuk membangun kepercayaan (*trust*) masyarakat internasional. Hal tersebut merupakan langkah etis dalam membuat kebijakan yang harus mengedepankan unsur rasional dalam implementasi keputusan pemberian bantuan luar negeri. Sehingga, kepedulian Indonesia terhadap krisis yang terjadi di Myanmar selain atas dasar kemanusiaan, juga menjadikannya momentum bagi Indonesia untuk membangun citra sebagai negara yang mempunyai pengaruh, khususnya dalam penyelesaian Krisis Politik dan pelanggaran HAM.

1.2. *Human Environment* (Masyarakat, Penduduk, Budaya)

Demonstrasi damai yang dilakukan oleh warga Myanmar terhadap eksistensi rezim militer yang telah mengambil alih rezim sipil yang berkuasa secara resmi kemudian direspon dengan berbagai macam tindakan kekerasan oleh pihak berwajib Myanmar dan militer Myanmar. Tindakan kekerasan itu mengakibatkan berbagai pelanggaran HAM yang sangat serius dan bahkan memancing perhatian dunia internasional.

Pelanggaran HAM mengakibatkan berbagai individu kehilangan nyawanya dalam proses demonstrasi yang dilakukan secara damai guna menyampaikan pendapat dan menggunakan hak politik dari warga sipil Myanmar dalam sistem pemerintahan demokrasi yang selama ini dianut oleh pemerintahan Myanmar. Pada bagian ini, akan dijelaskan dan dijabarkan secara komprehensif pelanggaran-pelanggaran HAM yang terdapat dalam kudeta militer Myanmar pada tahun 2021.

Ketegangan serta banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi di Myanmar, mengundang Aksi Solidaritas yang terjadi di beberapa negara termasuk Indonesia, pandemi tidak menghalangi sejumlah masyarakat melakukan Aksi Solidaritas baik secara langsung turun kejalan ataupun melalui sosial media.

Pada Rabu 10 Maret 2021 Massa yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) melakukan aksi solidaritas di depan Kedutaan Besar Myanmar. Dalam aksi solidaritas tersebut massa mengutuk keras atas kudeta militer dan mendesak penegakan demokrasi serta perlindungan HAM di Myanmar. Para pengunjung rasa juga

menuntut pemerintah Indonesia proaktif menekan junta militer Myanmar untuk menghormati demokrasi dan HAM serta menghentikan kekerasan dan penangkapan aktivis prodemokrasi di negara tersebut.

Masyarakat Indonesia melalui inisiatif ‘Gowes for Democracy #SaveMyanmar’, mengancam kudeta ilegal ini dan menuntut agar militer Myanmar (Tatmadaw) segera mengakhiri kekerasan dan mengembalikan demokrasi sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. Aksi ‘Gowes for Democracy’ turut mengimbau masyarakat Indonesia di manapun untuk menunjukkan solidaritasnya dengan cara apapun yang bisa dilakukan, baik daring maupun langsung. Kami mengajak untuk bergabung dengan lebih banyak aksi solidaritas, serta menggalang dukungan dengan mengirimkan surat/ kartu pos ke kontak Perserikatan Bangsa-Bangsa/ASEAN (Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)/kontak media melalui kampanye media sosial.

Aksi solidaritas atas tewasnya Kyal Sin atau yang dikenal dengan julukan Angel, gadis 19 tahun itu tewas saat terjadi bentrokan antara aparat dengan demonstran di kota Mandalay. Dan menjadi ikon perlawanan, terutama karena kaus bertuliskan “Everything Will Be Oke” yang dikenakannya saat turun ke jalan. Kejadian tersebut membuat warganet khususnya generasi Z Indonesia melakukan aksi solidaritas melalui postingan Twitter, Instagram, dan Whatsapp yang membanjiri akun sosial media penulis pada saat itu. Aksi solidaritas itu ditunjukkan dengan unggahan foto Kyal Sin saat berdemo dengan tagar #KyalSin, #angel, serta #EverythingWillBeOk.

Kelompok masyarakat yang menamakan diri The Milk Tea Alliance menggelar acara solidaritas untuk Kyal Sin dan rakyat Myanmar yang tengah melawan kudeta militer juga digelar di depan Gedung Sekretarian ASEAN Jakarta, Kelompok masyarakat ini terdiri dari organisasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, unsur mahasiswa dan masyarakat Papua. Aksi tersebut menuntut negara anggota Asean termasuk Indonesia, serta Sekretaris Jenderal Asean, Menteri Luar Negeri Indonesia, Dewan Keamanan PBB untuk mendukung perjuangan rakyat Myanmar dengan cara menyatakan sikap mendukung dikembalikannya pemerintah sipil yang demokratis. Mereka juga menuntut agar semua pihak menggunakan segala mekanisme regional maupun internasional untuk mendesak junta militer melepaskan tahanan. Massa juga menuntut agar ASEAN dan PBB memberikan perlindungan kepada warga sipil dan meminta militer menghentikan kekerasan. Selain orasi, dalam aksi ini para peserta menyalakan lilin dan mengangkat tiga jari sebagai simbol perlawanan terhadap

kudeta militer di Myanmar. Mereka juga menggelar foto sejumlah korban tindak kekerasan di Myanmar, menyalakan lilin, serta menabur bunga sebagai simbol duka dan solidaritas.

1.3. Society

Tercatat pada tahun 2017, sekitar 750 ribu orang Rohingya harus meninggalkan Myanmar akibat konflik yang semakin parah terhadap pasukan Tatmadaw. Keadaan itu semakin diperparah dengan adanya kudeta yang dilakukan oleh militer Myanmar. Adanya kudeta tentu membuat 750 ribu orang yang telah meninggalkan Myanmar tidak dapat kembali dan menemui keluarganya. Sementara sisa orang Rohingya yang masih menetap di daerah Myanmar semakin mendapatkan ancaman yang nyata dan hidup dalam keadaan trauma terhadap perlakuan militer Myanmar.

Ditambah oleh sebuah fakta bahwa pemimpin kudeta militer Myanmar, Jenderal Hlain mengatakan bahwa tindakan kekerasan sangat diperlukan untuk membersihkan daerah Rakhine dari populasi kaum Rohingya. Tentu perkataan yang diucapkan oleh petinggi militer dan pemimpin junta militer Myanmar semakin membuat takut dan khawatir kaum Rohingya. Walaupun begitu, militer Myanmar tetap meneruskan tindakannya terlepas dari protes keras dari dunia internasional. Tindakan dan perkataan rezim militer Myanmar dapat dikategorikan sebagai salah satu pelanggaran hak untuk hidup dengan damai dan aman, yang berarti setiap manusia dapat hidup dengan damai dan tenang, bebas dari segala ancaman dan marabahaya yang dapat mengancam keberadaannya, keluarganya dan bahkan orang lain.

Menyaksikan dan mencermati represi yang dilakukan oleh militer Myanmar kepada Muslim Rohingya di sebelah utara negara bagian Rakhine, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), menegaskan:

1. Mengecam segala tindakan kekerasan yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan. Bahwa segala bentuk tindakan kekerasan adalah tindakan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan.
2. Islam mengutuk kekerasan. Bahkan tidak ada satupun agama dan ideologi di dunia ini yang membenarkan cara-cara kekerasan dalam kehidupan. Umat Islam umumnya ikut merasakan kepedihan yang sangat luar biasa atas peristiwa yang menimpa saudara-saudara seiman yang berada di Myanmar.
3. Mengajak seluruh kepala negara dan pemimpin negara di dunia untuk pro-aktif melawan segala bentuk kekerasan. Represi adalah musuh bersama dan harus dilawan sekuat tenaga guna menciptakan upaya perdamaian dan harmoni.

4. Mengajak seluruh umat sedunia untuk terus menggalang solidaritas kemanusiaan untuk menciptakan perdamaian bagi segala bangsa.
5. Nahdlatul Ulama (NU) mendesak pihak-pihak terkait, terutama kepada komunitas Internasional dan PBB untuk segera mengambil langkah nyata dalam peristiwa kekerasan terhadap Muslim Rohingya yang terjadi di Myanmar.
6. Mendesak ASEAN untuk mengambil sikap dan langkah konkrit, khususnya pada pemerintah Myanmar agar segera mengakui status kwarganegaraan Muslim Rohingnya.
7. Mendesak kepada pemerintah Indonesia untuk mengambil langkah-langkah diplomasi bagi terwujudnya penghormatan atas hak azasi manusia di Myanmar.

2. Faktor Eksternal

2.1. *Non-Human Environment*

Kudeta yang terjadi di Myanmar mendapatkan respon yang beragam dari dunia internasional, masyarakat internasional memandang ASEAN sebagai organisasi regional tidak sepenuhnya peduli dan tidak melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan Krisis Politik di Myanmar, sehingga terkesan membiarkan krisis tersebut terus berlangsung.

Jadi kritik selama ini terhadap ASEAN including Indonesia adalah, mengapa ASEAN terkesan membiarkan masalah ini berlarut-larut? Dunia internasional itu menganggap seakan-akan ASEAN itu tidak sepenuhnya peduli, atau tidak melakukan upaya maksimal dalam menyelesaikan masalah ini. Padahal, dalam sejarahnya, ASEAN dibentuk untuk membangun ikatan solidaritas antar sesama negara Asia Tenggara. Sebagaimana sejak terbentuknya ASEAN, tidak pernah ada lagi perang, mulai dari perang Vietnam, perseteruan Thailand dengan Laos tahun 1986, invasi Vietnam ke Kamboja tahun 1978, sampai konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia dan Singapura. Selain itu, itu ASEAN juga mampu menciptakan situasi yang relatif stabil dan mampu mengelola komunikasi antar negara Asia Tenggara. Sehingga krisis Rohingnya menjadi semacam ujian bagi ASEAN, khususnya Indonesia sebagai salah satu anggotanya, untuk dapat mengembalikan kredibilitas ASEAN dalam menjaga stabilitas di Asia Tenggara.

Dalam hal ini Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan tegas terkait kudeta militer di Myanmar. Melalui pernyataannya hari Rabu 10 Maret 2021, dewan meminta militer menahan diri dan tidak melakukan kekerasan kepada para demonstran.

Dewan Keamanan PBB secara khusus mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap aksi damai demonstran, termasuk perempuan dan anak-anak serta menyerukan pembebasan

segera orang yang ditahan. Secara khusus juga menekankan semua pihak untuk menghormati kebebasan fundamental, HAM, dan menegakkan supremasi hukum. Selain itu, dewan menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pembatasan tenaga medis, anggota serikat pekerja, pekerja media, jurnalis, dan masyarakat sipil. Pernyataan ini merupakan versi revisi dari pernyataan pertama karena China dan Rusia yang memegang hak veto, merasa “kudeta militer” belum bisa digunakan untuk saat ini.

PBB menawarkan solusi alternatif kepada Myanmar karena kudeta militer dan kekerasan yang dialami masyarakat Myanmar menyita perhatian dunia internasional. Solusi pertama yang ditawarkan PBB, mengajak tatmadaw untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil, namun rekonsiliasi ini perlu memerlukan dorongan melalui negosiasi antara pihak militer dan pihak sipil. Solusi kedua dibentuknya pemerintahan sementara dengan pemimpin dari pihak netral bukan dari pihak militer ataupun pihak sipil. Pembentukan ini dengan catatan pihak militer Myanmar setuju karena menolak untuk memberikan kekuasaan terhadap sipil. Solusi ketiga yang ditawarkan PBB yaitu melakukan pemilu ulang setelah pernyataan tidak sah pemilu November 2020 dengan jangka waktu satu tahun sesuai dengan kehendak tatmadaw.

Amerika Serikat juga ikut mengancam akan bertindak untuk merespons kudeta militer di Myanmar. Dalam hal ini, Amerika Serikat mengancam segala upaya untuk menghalangi transisi demokrasi Myanmar atau mengubah hasil pemilu dan akan mengambil tindakan kepada mereka yang bertanggung jawab jika langkah ini tidak dihentikan dan mendesak militer mematuhi norma demokrasi dan supremasi hukum serta membebaskan mereka yang ditahan.

Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri AS menyatakan keprihatinan dan memberikan peringatan terhadap kudeta yang terjadi di Myanmar. Amerika menyerukan kepada para pemimpin militer Myanmar untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil dan menghormati keinginan rakyat Myanmar seperti yang diungkapkan dalam pemilihan umum demokratis. Amerika Serikat mendukung rakyat Myanmar terkait aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan perdamaian, dan pembangunan. Militer harus segera membalikkan tindakan ini.

Selain itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berkata, “Dalam demokrasi, kekerasan tidak boleh berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilihan yang kredibel. Selama hampir satu dekade, rakyat Burma telah terus bekerja untuk menetapkan pemilihan umum, pemerintahan sipil, dan transfer

kekuasaan secara damai. Kemajuan itu harus dihormati. Amerika Serikat memperhatikan orang-orang yang berdiri bersama rakyat Burma di saat-saat sulit ini. Kami akan bekerja sama dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma”.

Korea Selatan membekukan kerjasama dalam bidang pertahanan serta memblokir perdagangan persenjataan ke Myanmar sebagai respon terhadap kudeta yang terjadi Myanmar sedangkan Jepang menghentikan semua bantuan baru untuk Myanmar. Penangguhan bantuan ini dapat diperluas berdasarkan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi melalui surat kabar Nikkei pada 21 Mei 2021. “Kami tidak ingin melakukan itu sama sekali, tapi kami harus menyatakan dengan tegas bahwa sulit untuk melanjutkan dalam keadaan seperti ini,” ujar Motegi yang dilansir dari AFP. Ia melanjutkan, “Sebagai negara pendukung demokrasi Myanmar dengan berbagai cara dan sebagai sahabat, kami harus mewakili masyarakat internasional dan menyampaikan dengan jelas”.

2.2. Other Society

Akibat ratusan orang telah terbunuh dan kekhawatiran bahwa negara itu akan menghadapi perang saudara besar-besaran dan rakyat Myanmar akan menghadapi lebih banyak pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan di bawah hukum internasional. Amnesty International mengeluarkan surat terbuka kepada ASEAN untuk menghentikan pelanggaran Hak Asasi Manusia di Myanmar. Situasi di Myanmar bukan hanya masalah internal, ini adalah masalah HAM dan krisis kemanusiaan yang berdampak pada seluruh wilayah dan sekitarnya. Situasi di Myanmar sangat memprihatinkan dan membutuhkan tanggapan regional dan global yang cepat dan tegas. Kami yakin ASEAN memiliki peran penting untuk dimainkan dalam mengatasi krisis yang sedang berlangsung ini. Amnesty International mendesak ASEAN dan Negara anggotanya untuk bekerja sama dan segera mengambil tindakan untuk melindungi rakyat Myanmar. Setiap tindakan yang diambil ASEAN dan Negara Anggotanya setelah KTT darurat ini harus mematuhi hukum internasional, memenuhi komitmen internasional dan regional mereka, dan melindungi hak asasi manusia rakyat Myanmar.

Amnesty International menyadari bahwa salah satu prinsip inti dalam Piagam ASEAN adalah prinsip non-intervensi dalam urusan internal Negara-negara Anggotanya. Namun, apa yang dihadapi ASEAN saat ini jelas bukan masalah internal Myanmar. Militer Myanmar

tampaknya beroperasi dengan asumsi impunitas total. Menurut pandangan Amnesty International, situasi saat ini adalah akibat langsung dari kegagalan yang lebih luas oleh komunitas internasional, termasuk ASEAN, untuk meminta pertanggungjawaban militer Myanmar atas kejahatan di masa lalu. Jika tidak dihentikan, pelanggaran yang dilakukan oleh militer Myanmar akan mengakibatkan meningkatnya kekerasan dan konflik, memperburuk ketimpangan, kelaparan dan pemindahan massal, termasuk ke Negara Anggota ASEAN. Amnesty International juga mencatat bahwa cara Negara-negara Anggota ASEAN menggunakan prinsip non-intervensi tidak sejalan dengan pemahaman yang telah lama dipegang tentang prinsip ini dalam komunitas internasional. Sekarang sudah menjadi prinsip yang mapan bahwa perlindungan dan perwujudan hak asasi manusia secara keseluruhan tidak semata-mata merupakan urusan internal negara, tetapi masyarakat internasional memiliki kepentingan, termasuk kepentingan hukum dalam realisasinya.

Selain Amnesti Internasional, Save The Children mengatakan ada sebanyak 43 anak-anak terbunuh oleh personel angkatan bersenjata Myanmar sejak kudeta militer 1 Februari 2021. Save the Children mengatakan Myanmar mengalami "situasi yang mengerikan", dan korban meninggal termuda adalah bocah berusia tujuh tahun. Save the Children menegaskan bahwa kekerasan tersebut berdampak pada kesehatan mental anak-anak karena mereka mengalami ketakutan, kesedihan dan stres.

D. Kesimpulan

Faktor-faktor yang mendorong Indonesia membantu penyelesaian Krisis Politik di Myanmar:

1. Faktor Internal
 - a. Indonesia melalui Presiden Jokowi selain berfokus pada isu ekonomi juga aktif dalam isu HAM: Keselamatan dan Kesejahteraan Masyarakat Myanmar menjadi faktor yang sangat penting.
 - b. Aksi solidaritas masyarakat Indonesia terhadap Kudeta Militer Myanmar: mengutuk keras kudeta keras atas kudeta militer dan mendesak penegakan demokrasi serta perlindungan HAM di Myanmar.
 - c. Sikap tegas NU kepada Militer Myanmar muslim Rohingya dalam Kasus Krisis Politik Myanmar
2. Faktor Eksternal

- a. Respon dunia terhadap Kudeta Militer Myanmar: Mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap aksi damai demonstran, termasuk perempuan dan anak-anak serta menyerukan pembebasan segera orang yang ditahan. Secara khusus juga menekankan semua pihak untuk menghormati kebebasan fundamental, HAM, dan menegakkan supremasi hukum.
- b. Surat Terbuka Amnesty International: Kekhawatiran bahwa negara itu akan menghadapi perang saudara besar-besaran dan rakyat Myanmar akan menghadapi lebih banyak pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan di bawah hukum internasional. Situasi di Myanmar bukan hanya masalah internal, ini adalah masalah HAM dan krisis kemanusiaan yang berdampak pada seluruh wilayah dan sekitarnya. Situasi di Myanmar sangat memprihatinkan dan membutuhkan tanggapan regional dan global yang cepat dan tegas.

Daftar Pustaka

- AFP, R. (2021, Februari 1). *Desak Suu Kyi Bebas, AS Ancam Bertindak soal Kudeta Myanmar*. Retrieved Juli 14, 2022, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210201105616-106-600769/desak-suu-kyi-bebas-as-ancam-bertindak-soal-kudeta-myanmar>
- Ahmad, D. (2022, Mei 13). *5 Poin Konsensus ASEAN untuk Myanmar Dianggap Gagal*. Retrieved Juli 6, 2022, from Tempo.co: <https://dunia.tempo.co/read/1591099/5-poin-konsensus-asean-untuk-myanmar-dianggap-gagal>
- Aji, M. R. (2021, Maret 13). *Aksi Solidaritas untuk Myanmar Digelar di Depan Gedung ASEAN*. Retrieved Juli 12, 2022, from Tempo.co: <https://dunia.tempo.co/read/1441695/aksi-solidaritas-untuk-myanmar-digelar-di-depan-gedung-asean>
- Amani, N. K. (2021, Agustus 2). *ASEAN Ministerial Meeting ke-54, Indonesia Dorong Implementasi 5 Point of Consensus*. Retrieved Juli 8, 2022, from Liputan 6: <https://www.liputan6.com/global/read/4621943/asean-ministerial-meeting-ke-54-indonesia-dorong-implementasi-5-point-of-consensus>
- Arbar, T. F. (2021, Maret 4). *Kyal Sin, Cerita Sang Angel yang Tewas dalam Demo Myanmar*. Retrieved Juli 12, 2022, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210304180613-4-227929/kyal-sin-cerita-sang-angel-yang-tewas-dalam-demo-myanmar>
- Asmara, C. G. (2021, April 24). *Jokowi Bawa Misi Penyelesaian Konflik Myanmar di ALM*. Retrieved Juni 23, 2021, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210424141953-4-240520/jokowi-bawa-misi-penyelesaian-konflik-myanmar-di-alm>

- Asmara, C. G. (2021, Maret 19). *Resolute! Jokowi: Stop Myanmar's Atrocities Immediately*. Retrieved Juni 23, 2021, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210319121730-4-231381/tegas-jokowi-hentikan-segera-aksi-kekejaman-myanmar>
- Christiastuti, N. (2021, Februari 1). *Myanmar Dilanda Kudeta Militer, Apa Kata Pengungsi Rohingya?* Retrieved Juli 4, 2022, from Detik News: <https://news.detik.com/internasional/d-5357000/myanmar-dilanda-kudeta-militer-apa-kata-pengungsi-rohingya>
- Dani, S. A. (2021, Maret 10). *Aksi Solidaritas, KSBSI Unjuk Rasa di Depan Kedubes Myanmar*. Retrieved Juli 11, 2022, from Akurat.co: <https://akurat.co/aksi-solidaritas-ksbsi-unjuk-rasa-di-depan-kedubes-myanmar>
- Fathoni. (2016, November 21). *Pernyataan Sikap PBNU soal Penindasan Muslim Rohingya*. Retrieved from NU Online: <https://www.nu.or.id/taushiyah/pernyataan-sikap-pbnu-soal-penindasan-muslim-rohingya-uyCyH>
- Haryadi, M. (2021, Maret 11). *DK PBB Keluarkan Pernyataan Tegas Soal Kudeta Militer di Myanmar*. Retrieved Juli 12, 2022, from Tribun News: <https://www.tribunnews.com/internasional/2021/03/11/dk-pbb-keluarkan-pernyataan-tegas-soal-kudeta-militer-di-myanmar>
- Hidriyah, S. (2021, Maret 2). *KRISIS POLITIK MYANMAR DAN INTERVENSI ASEAN*. Retrieved Juli 12, 2022, from berkas.dpr.go.id: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-6-II-P3DI-Maret-2021-229.pdf
- Indonesia, C. (2021, April 27). *Lima Konsensus ASEAN soal Myanmar: Solusi atau Formalitas?* Retrieved Juli 6, 2022, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210427170918-106-635524/lima-konsensus-asean-soal-myanmar-solusi-atau-formalitas>
- International, A. (2021, April 23). *SURAT TERBUKA: HENTIKAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA YANG TERJADI DI MYANMAR*. Retrieved Juli 16, 2022, from Amnesty International: <https://www.amnesty.id/surat-terbuka-hentikan-pelanggaran-hak-asasi-manusia-yang-terjadi-di-myanmar/>
- Irawati, A. (2016). Myanmar dan Matinya Penegakan Demokrasi. *Jurnal Penelitian Politik*.
- Ivana, Faustina. (2021). Kudeta Myanmar : Junta Militer di Era Modern. *Jurnal Pena Wimaya*.
- Kontras. (2021, April 19). *Gowes for Democracy: Pesan Solidaritas dari Indonesia untuk Rakyat Myanmar demi Pulihkan Demokrasi dan Akhiri Kekerasan*. Retrieved Juli 12, 2022, from Kontras: <https://kontras.org/2021/04/19/gowes-for-democracy-pesan-solidaritas-dari-indonesia-untuk-rakyat-myanmar-demi-pulihkan-demokrasi-dan-akhiri-kekerasan/>

- Maksum, A. (2018). *Potret Demokrasi Asia Tenggara Pasca Perang Dingin: Analisa, Dinamika, dan Harapan*. Yogyakarta: The Phinisi Press.
- Malau, S. (2021, April 7). *Peran Aktif Indonesia dalam Upaya Penyelesaian Krisis di Myanmar*. Retrieved Juli 6, 2022, from [Tribunnews.com: https://www.tribunnews.com/internasional/2021/04/07/peran-aktif-indonesia-dalam-upaya-penyelesaian-krisis-di-myanmar](https://www.tribunnews.com/internasional/2021/04/07/peran-aktif-indonesia-dalam-upaya-penyelesaian-krisis-di-myanmar)
- News, B. (2021, April 1). *Kudeta Myanmar: Lebih dari 40 anak-anak dibunuh oleh militer, 'mereka menembak dan memukulnya'*. Retrieved Juli 16, 2022, from BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-56605853>
- Perwita, A. A. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pramadiba, I. M. (2021, Maret 15). *Ikuti Korea Selatan, Jepang Siapkan Respon Terhadap Kudeta Myanmar*. Retrieved Juli 14, 2022, from [Tempo.co: https://dunia.tempo.co/read/1442325/ikuti-korea-selatan-jepang-siapkan-respon-terhadap-kudeta-myanmar](https://dunia.tempo.co/read/1442325/ikuti-korea-selatan-jepang-siapkan-respon-terhadap-kudeta-myanmar)
- Presiden, S. (2021, Maret 18). *Pernyataan Presiden RI terkait Situasi Myanmar*. Retrieved Juli 6, 2022, from Youtube Sekretariat Presiden: <https://youtu.be/rh9wNxX2a5Q>
- Press, A. (2021, Maret 10). *Puluhan Aktivis Buruh Indonesia Gelar Protes Menentang Kudeta di Myanmar*. Retrieved Juli 11, 2022, from [VOA: https://www.voaindonesia.com/a/puluhan-aktivis-buruh-indonesia-gelar-protes-menentang-kudeta-di-myanmar/5808756.html](https://www.voaindonesia.com/a/puluhan-aktivis-buruh-indonesia-gelar-protes-menentang-kudeta-di-myanmar/5808756.html)
- Reuters. (2021, Februari 2). *Kudeta militer di Myanmar: Presiden AS Joe Biden ancam kembali jatuhkan sanksi*. Retrieved Juli 14, 2022, from BBC News: <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55882233>
- RI, K. (2021, September 20). *Kontribusi Indonesia Senilai USD 200.000 untuk Bantuan Kemanusiaan ASEAN kepada Myanmar Mulai Didistribusikan Akhir September 2021*. Retrieved Juli 11, 2022, from [Kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/read/2943/berita/kontribusi-indonesia-senilai-usd-200000-untuk-bantuan-kemanusiaan-asean-kepada-myanmar-mulai-didistribusikan-akhir-september-2021#:~:text=%E2%80%8BJakarta%2C%20Indonesia%20%E2%80%93%20Indonesia%20memberikan,D](https://kemlu.go.id/portal/id/read/2943/berita/kontribusi-indonesia-senilai-usd-200000-untuk-bantuan-kemanusiaan-asean-kepada-myanmar-mulai-didistribusikan-akhir-september-2021#:~:text=%E2%80%8BJakarta%2C%20Indonesia%20%E2%80%93%20Indonesia%20memberikan,D)
- Saukani, Muhammad Izzu. 2020. *Konsistensi Kebijakan Untuk Tetap Menawarkan Solusi Dua Negara Dalam Konflik Israel-Palestina*. Skripsi, Yogyakarta: UII.
- Sicca, S. P. (2021, Februari 13). *Militer Kembali Berkuasa, Etnis Rohingya di Myanmar Trauma Kembali Disiksa*. Retrieved Juli 4, 2022, from [Kompas.com: https://www.kompas.com](https://www.kompas.com)

<https://www.kompas.com/global/read/2021/02/13/132608470/militer-kembali-berkuasa-etnis-rohingya-di-myanmar-trauma-kembali-disiksa?page=all>

Snyder, R. C. (2002). *Foreign Policy Decision Making: An Approach to the Study Of International Politics*. New York: Palgrave Macmillan.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tempo.co. (2021, Agustus 5). *Krisis Politik di Myanmar Jadi Sorotan di Pertemuan AMM*. Retrieved Juli 8, 2022, from Tempo.co: <https://dunia.tempo.co/read/1491098/krisis-politik-di-myanmar-jadi-sorotan-di-pertemuan-amm>